



# TIPS

Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial  
Vol. 1 – No. 1 Juni 2023

<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tips>

## SEJARAH ISTILAH DAN LAHIRNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Nur Saadah<sup>1</sup>, Evi Sukma Pratiwi<sup>2</sup>, Nayla Rizka Irwani<sup>3</sup>, Diana Siregar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: [nursaadahnst1@gmail.com](mailto:nursaadahnst1@gmail.com)<sup>1</sup>, [evisukma@gmail.com](mailto:evisukma@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[Naylarizkairwani01110@gmail.com](mailto:Naylarizkairwani01110@gmail.com)<sup>3</sup>, [dianasiregar728888@gmail.com](mailto:dianasiregar728888@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Kewarganegaraan adalah pengembangan pendidikan nilai, yaitu pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa dalam setiap kurikulum Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan tentunya sangat penting untuk mendidik generasi muda yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia di negeri ini. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di dunia pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790. Dalam artikel ini, metode pengumpulan data menggunakan metode studi analisis pustaka. Dengan sumber informasi berupa buku dan jurnal.

Berdasarkan analisis tersebut diharapkan pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sebagai sarjana yang tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga sikap, keterampilan dan kesadaran kewarganegaraan yang tinggi untuk menjadi warga negara yang peduli Partisipasi dan disiplin yang tinggi bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa dan negara.

**Kata Kunci:** Sejarah lahirnya pendidikan, kewarganegaraan

### Abstract

*Citizenship is the development of value education, namely education that socializes and internalizes Pancasila values and national culture in every Pancasila and Citizenship curriculum. Values education and citizenship education are of course very important to educate the younger generation who are faithful, pious and have noble character in this country. The history of civic education in the world was first introduced in the United States in 1790. In this article, the data collection method uses the method of literature analysis. With sources of information in the form of books and journals.*

*Based on this analysis, it is hoped that citizenship education can help students develop their potential as graduates who not only have knowledge but also attitudes, skills*

*and high citizenship awareness to become citizens who care. High participation and discipline are responsible for the progress of the nation and state.*

**Keywords:** *History of the birth of education, citizenship*

## PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk dipahami oleh generasi penerus bangsa. Salah satu bentuk pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan kewarganegaraan liberal. Lingkungan pembelajaran teori kewarganegaraan pada awalnya sangat terbatas, sehingga diperlukan perubahan mendasar di bidang pendidikan dari negara berkembang menjadi negara maju, yang tentunya membutuhkan pendekatan yang efektif dan visioner dengan model pembelajaran yang menarik.

Kewarganegaraan adalah pengembangan pendidikan nilai, yaitu pendidikan yang mensosialisasikan dan menciptakan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa, sebagaimana dalam setiap kurikulum Pancasila dan kewarganegaraan. Tentunya pendidikan yang bernilai dan pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan untuk membangun generasi muda yang berwatak beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkompeten dan berkarakter di bidangnya. Kepribadian suatu bangsa terbentuk bila mampu membentuk pemahaman dasar yang seimbang antara pendidikan nilai dan pendidikan politik. Oleh karena itu diperlukan beberapa pendekatan yang harus dilaksanakan untuk membentuk kepribadian bangsa dengan memasukkan nilai-nilai dasar kehidupan melalui pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan.

Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship education) memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah bahan pendidikan yang siap membentuk perilaku individu untuk mendukung dan memperkuat masyarakat politik sepanjang masyarakat politik itu positif dan bernilai. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menyiapkan dan mengajarkan fakta-fakta tentang lembaga/badan dan cara-cara menjalankan kehidupan politik negara, tetapi juga menyangkut masalah jati diri dan jati diri bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memajukan arah tujuan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Pancasila dan UUD 1945, Pendidikan Kewarganegaraan ingin melaksanakan tujuan dan sasaran pendidikan nasional secara sistematis.

## METODOLOGI

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam analisis adalah judul "Sejarah Istilah dan Lahirnya Pendidikan Kewarganegaraan", yaitu melalui kajian studi analisis pustaka. Pengumpulan data untuk analisis ini menggunakan media berupa

buku atau e-book dan jurnal. Metode studi analisis pustaka adalah metode pengumpulan data dalam bentuk Mencari informasi dalam dokumen tertulis, dokumen tidak tertulis, serta gambar yang dapat mendukung proses penulisan.

Metode penelitian studi analisis pustaka ini memiliki empat ciri, yaitu: pertama, penulisan tidak terlibat langsung di lapangan tetapi memproses teks atau data. Kedua, data pustaka siap untuk digunakan. Ketiga, data pustaka adalah data yang tidak asli dari data di lapangan atau disebut oleh pihak lain. Keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan pendataan tersebut di Analisis ini dilakukan dengan mengkaji dan meneliti sejumlah buku, atau e-book jurnal dan Artikel dianggap relevan dengan analisis penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Lahirnya pendidikan kewarganegaraan

Sejarah kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 dengan nama Soekarno atau lebih dikenal dengan civic. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan sebagai pelajaran di sekolah dimulai pada tahun 1961 dan berganti nama menjadi kewarganegaraan pada tahun 1968. Civic berasal dari kata latin civicus yang artinya warga negara, selain tujuannya membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang tahu bagaimana mengambil sikap, hak dan kewajiban warga negara. Istilah civic adalah istilah tertua, seperti yang pertama kali digunakan oleh Chreshore pada tahun 1886. Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) merupakan perpanjangan dari pendidikan kewarganegaraan yang lebih menekankan pada bimbingan kewarganegaraan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan disebut juga sebagai pendidikan orang dewasa, yang mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara. Mata pelajaran kewarganegaraan secara resmi dimasukkan dalam kurikulum sekolah di Indonesia pada tahun 1968. Ketika tahun pelajaran berganti dari Januari menjadi Desember dan pada tahun 1975 dari Juli menjadi Juni, Departemen pendidikan Indonesia mengubah nama kewarganegaraan dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Nama mata pelajaran PMP kembali diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada tahun 1994. Pada masa reformasi, PPKn berubah menjadi PKn dan menghilangkan kata pancasila yang dianggap sebagai produk orde baru. Di perguruan tinggi, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan nama Hak Sipil, kemudian kurikulum dalam sistem baru menjadi PMP-KN, dan sekarang banyak yang menggunakan program Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Citizenship education tidak hanya mencakup bentuk pendidikan kewarganegaraan formal, tetapi juga pembelajaran nonformal dan bentuk pendidikan kewarganegaraan nonformal. Citizenship education adalah konsep pendidikan

kewarganegaraan dalam arti umum (umum) dan lebih luas. Citizenship education atau pendidikan kewarganegaraan, adalah program pendidikan demokrasi politik yang ditujukan bagi mahasiswa atau warga negara yang bersangkutan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan kewarganegaraan ( Citizenship education) dalam arti yang lebih sempit, yaitu sebagai salah satu bentuk pendidikan formal, misalnya Jurusan, kursus atau kursus di sekolah, universitas atau lembaga pendidikan formal lainnya. Sejarah pendidikan kewarganegaraan dunia pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790. Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) mengacu pada mata pelajaran, sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) mengacu pada kerangka konseptual umum dari program pendidikan kewarganegaraan yang demokratis. Konsep pendidikan politik dikenal juga dengan istilah sistem pendidikan politik (spkn). (Hidayat et al., 2020)

Pada tahun 1962, Sebagai Menteri Kehakiman Suhardjo mengusulkan untuk mengubah doktrin kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan. Prijono menerima tawaran sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan, namun hanya secara formal kementerian pendidikan dan kebudayaan tidak memutuskan untuk mengubah syarat tersebut. Sistem pendidikan Indonesia saat itu mengembangkan dua istilah untuk mempelajari kewarganegaraan, yaitu civic dan kewarganegaraan. Kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian dalam kurikulum sekolah dasar, menengah, dan menengah atas. Perbedaan dari kedua istilah tersebut adalah bahwa civic mengajarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sedangkan Kewarganegaraan mengajarkan kesadaran untuk hidup sebagai bangsa yang memiliki hak dan kewajiban. Perubahan ini didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia, yaitu membangun warga negara yang baik dan cerdas. (Widiatmaka, 2022)

Sumber buku yang digunakan guru pada saat itu adalah “Kewarganegaraan “manusia dan Masyarakat Indonesia Baru” dan “Tujuh Materi Pokok Indoktrinasi” atau lebih dikenal dengan TUBAPI (Wuryandari, 2012). Kedua buku tersebut ditulis oleh Ir. Soekarno dan beberapa rekannya, berisi tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mata pelajaran Kewarganegaraan saat itu lebih menekankan pada aspek kognitif dan indoktrinasi. karena sebagian besar warga negara Indonesia terutama yang tinggal di daerah terpencil masih belum mengetahui secara jelas dan mendalam tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui jurusan ilmu-ilmu sosial, khususnya politik, kurikulum, yakni partai demokrasi yang terdidik, ikut ambil bagian. Partai-partai demokrasi yang terlatih dalam politik kemudian melahirkan konsep pendidikan politik bagi warganya. Dari sinilah lahir bibit pendidikan kewarganegaraan yang berubah sesuai era politik. (L, 2019)

Kurikulum Pancasila (1994) yang disebut sebagai Siswa Kewarganegaraan (2006) dalam Kurikulum KTSP (2006) dan yang berganti nama menjadi Pancasila

(2013) dalam kurikulum tersebut, dan kurikulum Kewarganegaraan bersumber dari Sejarah panjang bangsa Indonesia yang dimulai lama dan terus berlanjut, bahkan di era reformasi saat ini. Bangsa Indonesia telah menyikapi kondisi perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan berdasarkan nilai-nilai bersama perjuangan rakyat, yang selalu tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai mereka didasarkan tekad dan semangat kebangsaan. Semuanya akan tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mampu memimpin proses besar-besaran pembentukan negara kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia menjawab kondisi perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan berdasarkan kesamaan nilai perjuangan rakyat, yang terus tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai dilandasi oleh tekad dan semangat kebangsaan. semuanya tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mampu memimpin proses pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Darmadi, 2014)

#### B. Pentingnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada hakekatnya adalah untuk membentuk warga negara yang baik (good citizen). Tidak dapat dipungkiri pula bahwa istilah “warga negara yang baik” memiliki pengertian pendidikan yang berbeda-beda dan sering berubah dari satu negara ke negara lain sesuai dengan perkembangan masing-masing bangsa. Warga negara yang baik menurut tujuan pendidikan nasional adalah mereka yang berinteraksi dengan pendidikan kewarganegaraan, warga negara yang bertanggung jawab secara demokratis (Pasal 3), dan warga negara yang berjiwa kebangsaan dan cinta tanah air (UU No. 20 Tahun 2003) (pasal 37). Kewarganegaraan Indonesia sering berubah karena perkembangan kewarganegaraan di Indonesia semakin sulit. Pada tahun 1947, kurikulum sekolah nasional, atau rencana pelajaran, pada intinya menekankan tujuan mendidik dan mengembangkan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius. tetapi tidak dimasukkan dalam mata pelajaran khusus yang disebut misalnya kewarganegaraan, kewarganegaraan atau yang lain. Namun, itu termasuk dalam mata pelajaran pendidikan moral. (Santoso, 2017)

Pada tahun 1957, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Kurikulum Pengembangan Kebijakan dan Pengajaran Kewarganegaraan (1957) dengan menggunakan kata kewarganegaraan, meliputi perolehan dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 dimensi yaitu program akademik, kurikulum dan program sosial. (Winataputra, 2012)

Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai program akademik merupakan kegiatan keilmuan oleh masyarakat untuk memperkaya pengetahuan kewarganegaraan, kurikulumnya adalah sekolah atau pendidikan di dunia pendidikan yang meliputi program di sekolah dan di luar sekolah, program sosial memiliki program

yang bersifat diimplementasikan, atas nama publik. Dalam rangka membangun kompetensi kewarganegaraan masyarakat, sudah sewajarnya diperlukan konsep pendidikan kewarganegaraan yang berwawasan global, yang berdasarkan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia melalui pendidikan informal. Pendidikan politik adalah semangat perjuangan rakyat, yang menekankan kekuatan intelektual-spiritual, yang menghasilkan kekuatan luar biasa dalam perjuangan fisik, sekaligus mewujudkan kemerdekaan dalam menghadapi globalisasi, yang membutuhkan perjuangan non fisik sebagai rakyat, dalam perjuangan sebagai rakyat dalam bidang profesional. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan rakyat yang berwawasan dan kesadaran akan tanah air, berbangsa yang cinta tanah air, sikap dan perilaku yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa untuk mempertahankan negara sebagai negara. utuh dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diraih melalui perjuangan keras dan pengorbanan harta, jiwa raga, harus dicapai melalui kerja pembangunan di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang bertugas mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan negara harus memiliki keterampilan yang tinggi dan komitmen yang kuat terhadap tujuan perjuangan yang telah dimulai. kemerdekaan negara ini. Persepsi hanya tumbuh dan berkembang ketika generasi penerus bangsa memahami dan menghargai bagaimana perjuangan bangsa diperjuangkan. Dari pengertian tersebut lahir patriotisme, keceriaan, cinta tanah air, sikap tidak mementingkan diri sendiri dan keinginan untuk mempertahankan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. (Wibowo & Wahono, 2017)

### C. Tujuan pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional secara umum. Oleh karena itu diperlukan kurikulum dan proses pembelajaran pendidikan politik di semua jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tugas dan peran pendidikan politik adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Mampu memahami mata pelajaran/tema pendidikan kewarganegaraan. kemudian perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional, yang kesemuanya menjadi dasar dan pola pikir pendidikan kewarganegaraan. Tujuan PPKn adalah menjadi warga negara yang baik (good citizen). Hal ini tercermin dari munculnya berbagai nama pendidikan kewarganegaraan (Pkn). Sejalan dengan perkembangan dan pasang surut perjalanan politik bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai kebijakan pendidikan, terutama kewarganegaraan, yang ditelusuri kembali ke UUD 1945 melalui keputusan presiden tahun 1959, termasuk instruksi untuk memperbaiki buku di perguruan

tinggi. Hal ini membuktikan munculnya berbagai kebijakan di bidang pendidikan khususnya kewarganegaraan sebagai konsekuensi dari Dekrit Presiden Tahun 1959 yang dikembalikan ke UUD 1945. termasuk instruksi untuk memperbarui buku Universitas Penjelasan Pasal 35(3) menjelaskan apa artinya ini “Kursus Kewarganegaraan” adalah pendidikan yang meliputi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Membentuk peserta didik menjadi warga negara yang adalah nasionalisme dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan sedemikian rupa agar siswa mengembangkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, demokratis, beradab, kompetitif, disiplin dan berpartisipasi aktif untuk pelaksanaan tujuan nasional yang terlibat dalam pembangunan Negara.

Dalam pembukaan UUD 1945, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mengelola pengetahuan, keterampilan dan sikap nilai-nilai sosial juga diperlukan dalam kaitannya dengan implementasi pengetahuan, profesi dan kompetensi serta partisipasi dalam kehidupan untuk bersosialisasi. Secara klasik sering dikatakan bahwa tujuan kewarganegaraan Indonesia adalah menjadikan warga negara yang baik (*good citizen*). Namun sebelumnya, ada lebih banyak konsep warga negara yang baik untuk ditafsirkan sesuai dengan interpretasi otoritas. Konteks di atas adalah untuk diskusi PKn sebagai mata pelajaran yang menekankan pada aspek teoretis kewarganegaraan sebuah negara dengan warga negara dan warga negara yang diperintah oleh pemerintah. Hukum adalah cabang ilmu politik yang disebut politik demokrasi, kajian demokrasi politik di sekolah dapat dilihat dari perspektifnya berbeda. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah ilmu terapan pendidikan kewarganegaraan, sedangkan yang namanya kewarganegaraan, Pancasila dan pendidikan moral Kewarganegaraan (PMP dan PKn) dan Pancasila dan PKn (PPKn), nama warga berubah sesuai dengan situasi dan keadaan politik. Kewarganegaraan dalam konteks sejarah kuno. Sejak adanya kerajaan-kerajaan kepulauan dan masuknya unsur-unsur Hindu, Budha, dan Islam, kewarganegaraan ada dalam masyarakat yang diasosiasikan dengan sistem kepercayaan. Pendudukan Jepang (Sidang BPUPKI I dan II pembentukan PPKI). Deklarasi 17 Agustus 1945 Pengertian Pancasila dalam UUD 1945 (sidang PPKI 18 Agustus 1945). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) saat ini Karakteristiknya diatur oleh inkubasi nilai dan pengetahuan difusi hal ini dapat dilihat dari bahan ajar dikembangkan berdasarkan pokok-pokok dari setiap sila Pancasila. Belajar juga bertujuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Dalam UU No. 20 Sistem Pendidikan Negara 2003 mencatat bahwa tugas pendidikan nasional adalah pembangunan

keterampilan dalam rangka pendidikan dan pembentukan karakter dalam kehidupan masyarakat dan peradaban bangsa yang berharga yang berusaha untuk berkembang untuk memampukan dan membentuk Peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang utuh, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada para sarjana dan profesional yang berjiwa nasionalisme dan cinta tanah air, warga negara demokratis yang beradab, kompetitif, disiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Tujuan pendidikan kewarganegaraan umum adalah menyadarkan setiap warga negara terhadap nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta komitmen terhadap kebhinekaan dan kebersamaan. untuk kesatuan dari Republik Indonesia Tujuan pendidikan kewarganegaraan umum adalah menyadarkan setiap warga negara akan nilai dan moral Pancasila, nilai dan standar undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan komitmen untuk bersatu dalam perbedaan dan komitmen untuk kesatuan dari Republik Indonesia. (Zulfikar & Dewi, 2021)

### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sejarah kewarganegaraan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimulai dari namanya disebut civic, yang dipakai oleh Amerika Serikat sebagai PKN, PMP, PPKN. Kewarganegaraan.

Perjuangan bangsa ini dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan, visi dan kesadaran bangsa yang cinta tanah air, sikap dan perilaku manusiawi yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa untuk melindungi negara agar tetap menjadi negara yang utuh dan mempertahankan negara kesatuan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah salah satu tujuan utama pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi untuk mendidik warga negara yang baik, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan mengelola pengetahuan, keterampilan dan sikap. Demikian pula dengan nilai-nilai sosial yang diperlukan sehubungan dengan penerapan pengetahuan, profesi dan kompetensi serta partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Darmadi, H. (2014). *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* (2nd ed.). Alfabeta.

- Hidayat, H., Mulyani, H., Nurhasanah, S. D., Khairunnisa, W., & Sholihah, Z. (2020). Peranan Teknologi Dan Media Pembelajaran Bagi Siswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2).  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- L, S. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Warga Negara Yang Cerdas Dan Baik (Smart and Good Citizen). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XIV(2), 112–120.  
<https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/13143>
- Santoso, M. I. (2017). Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1(1).
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 196–205. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16043>
- Widiatmaka, P. (2022). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di Dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–10.
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Widya Aksara Press.
- Wuryandari, W. dan F. (2012). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Ombak.
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104–115. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>